LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunandaerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sampai Triwulan IV melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Program, Kegiatan, dan SubKegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkanpencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
4. Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/263/K/411.013/2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja, tujuan dan sasaran DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

3. BAB. III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
4. BAB. IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerjayang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakankriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah

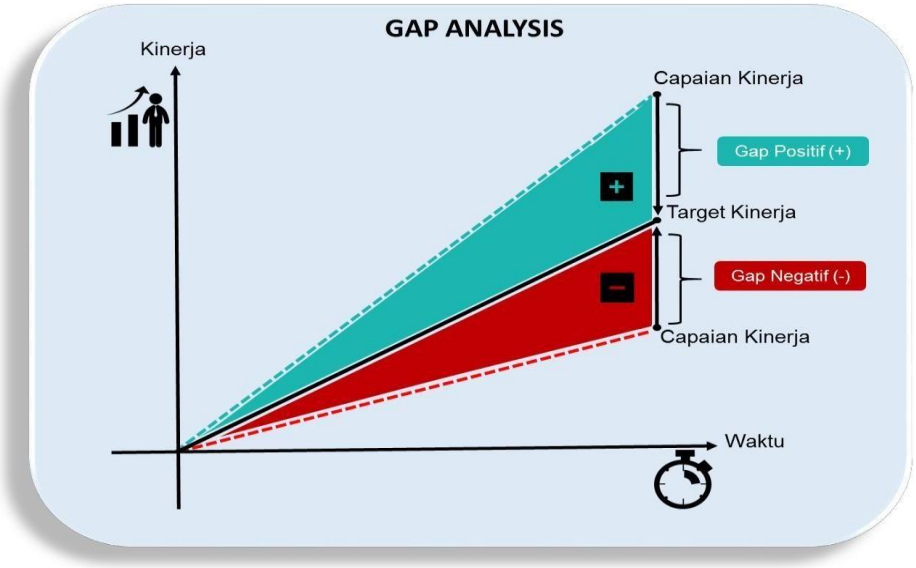
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telahmemenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkanantara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupunnegatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

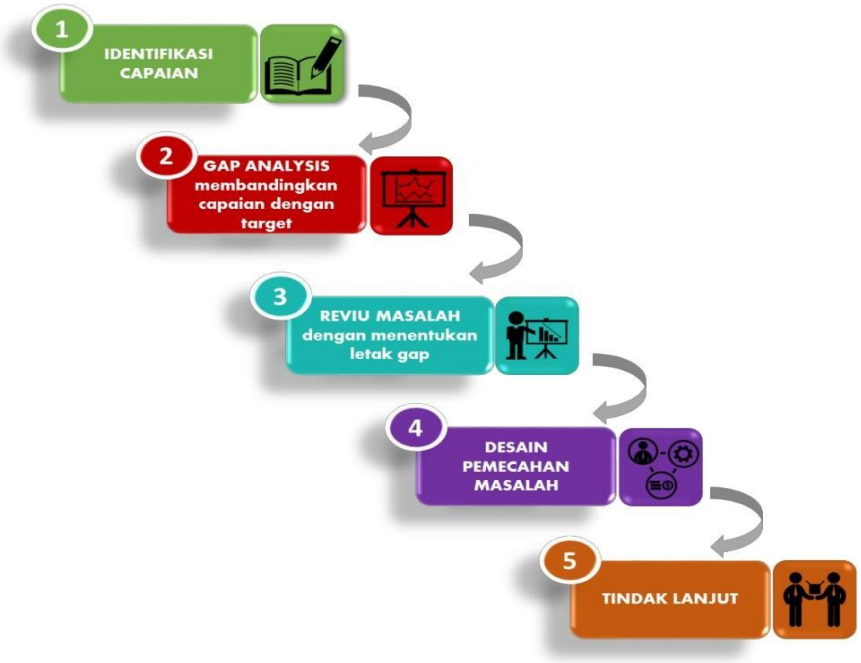
Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.

2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangn tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasiRenja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Tujuan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Indeks Desa	0,7810	0,7928	101,5%
	Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa	2. Tingkat Status Perkembangan Desa	45,5%	50%	110%

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Pencapaian status Persentase Desa Mandiri.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Nilai Sakip***	**75**	**6.449.953.132**	74,15	**5.654.251.598**	***98,86%***	***87,66%***
1.1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu**	**14 Dokumen**	**39.307.200**	**14 Dokumen**	**39.114.250**	100%	***99,51%***
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14 Laporan	39.307.200	14 Laporan	39.114.250	100%	***99,51%***
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu**	**105 Dokumen**	**5.281.640.000**	**105 Dokumen**	**4.495.537.683**	**91,43%**	**85,12%**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	5.255.535.000	31 Orang/12 bln	4.469.531.683	**100%**	**85,04%**
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	2 Laporan	5.691.000	2 Laporan	5.593.000	**100%**	**98,28%**

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuang Bulan/ Triwulanan/ semesteran SKPD	72 Laporan	20.414.000	72 Laporan	20.413.000	**100 %**	**99,99 %**
1.3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat Kehadiran ASN**	0	-				
1.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai						
1.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta adtribut Kelengkapannya						
1.4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia**	**3.612 Dokumen**	**333.020.800**	**3.564 Dokumen**	**331.293.120**	***98,67%***	***99,48 %***
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponeninstalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang di sediakan	1 Paket	19.998.900	1 Paket	19.982.930	100 %	***99,92%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang disediakan	8 Paket	55.275.400	8 Paket	54.686.932	100%	***98,94%***
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	2 Paket	2.152.500	2 paket	1.972.000	100%	***91,61%***
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	3.000.000	100%	***100%***
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	550 Laporan	236.938.000	550 Laporan	236.835.799	100%	***99,96%***
1.4.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penata usahan arsip dinamis pada SKPD	3.000 Dokumen	15.666.000	2.991 Dokumen	14.815.459	99,7%	***94,57%***
1.5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Yang Tersedia Untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6 unit**	**82.415.058**	**6 Unit**	**80.662.950**	**100%**	***97,87%***
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas /Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatanyang di sediakan						
1.5.2	Pengadaan Kendaraan Operasional / Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ lapangan yang disediakan						

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.5.3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yangdisediakan	0 unit	0	0 Unit	0	0%	*0%*
1.5.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yangdi sediakan	6 Unit	82.415.058	6 Unit	80.662.950	100%	***97,87%***
1.6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat**	**50 Laporan**	**89.026.000**	**26 Laporan**	**86.253.529**	52%	***96,88%***
1.6.1	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	2 Laporan	27.026.000	2 Laporan	26.853.453	100%	***99,36%***
1.6.2	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 laporan	62.000.000	24 laporan	59.400.076	100%	***95,81%***
1.7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Yang Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi**	**69 Unit**	**624.544.074**	**69 Unit**	**621.390.066**	**100%**	**99,49%**
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara yang dibayarkan	7 Unit	328.279.693	7 Unit	326.320.757	100%	***99,40%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
1.7.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	20 Unit	3.302.754	20 Unit	3.270.750	100%	***99,03%***
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit	38.850.000	40 Unit	38.850.000	100%	100%
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan banguan gedung kantor lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	2 Unit	254.111.627	2 Unit	252.948.559	100%	***99,54%***
2.	***PROGRAM PENATAAN DESA***	***Persentase Desa Yang Mendapatkan FasilitasiPenataan Desa***	**25%**	**91.964.100**	**25,76 %**	**91.008.000**	103%	***98,96%***
2.1	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa**	**66 Desa**	**91.964.100**	**68 Desa**	**91.008.000**	103%	***98,96%***
2.1.1	Pembentukan Penghapusan ,Penggabungan dan Perubahan Status	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	11.017.650	0 Desa	10.905.800	0,00%	***98,98%***
2.1.2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	30 Desa	30.685.000	19 Desa	30.082.600	63,33%	***98,04%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
2.1.3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya	25 Desa	7.779.200	27 Desa	7.684.800	108%	***98,79%***
2.1.4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penamaandan Kode Desa						
2.1.5	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat ,Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota						
2.1.6	Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa	Jumlah sarana dan Pra Sarana Desa	10 Unit	42.482.250	22 Unit	42.334.800	220%	***99,65%***
3.	***PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA***	***Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan***	**87%**	**124.114.950**	**87%**	**122.671.867**	**100%**	***26,59%***
3.1.	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan**	**230 Desa**	**124.114.950**	**230 Desa**	**122.671.867**	**100%**	***98,84%***
3.1.1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja sama antar Desa	10 Dokumen	86.193.850	10 Dokumen	85.830.830	100%	***99,58%***
3.1.2	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kerja sama antarDesa dengan pihak Ketiga	15 Dokumen	5.047.750	15 Dokumen	4.955.800	100%	***98,18%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
3.1.3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	32.873.350	2 Dokumen	31.885.237	100%	***96,99%***
4.	***PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA***	***Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa***	**100%**	**5.333.053.825**	**100%**	**5.083.071.237**	**100%**	***95,31%***
4.1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa**	**100%**	**5.333.053.825**	**100%**	**5.083.071.237**	**100%**	***95,31%***
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	4 Dokumen	8.201.900	4 Dokumen	8.201.900	100 %	***100%***
4.1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	528 Dokumen	80.418.500	528 Dokumen	77.193.500	100%	***95,99%***
4.1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	264 Dokumen	25.273.500	264 Dokumen	23.773.500	100%	***94,06%***
4.1.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan KeuanganDesa	264 Dokumen	4.911.941.775	264 Dokumen	4.670.029.187	100%	***95,08%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
4.1.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	8.400.500	100 Orang	8.287.100	100%	***98,65%***
4.1.6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa	80 Dokumen	49.704.750	80 Dokumen	49.016.800	100%	***98,62%***
4.1.7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	Jumlah Laporan hasil Penyelengggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	167.358.500	1 Laporan	166.152.850	100%	***99,28%***
4.1.8	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	7.279.400	1 Laporan	6.891.000	100%	***94,66%***
4.1.9	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen ProfilDesa	264 Dokumen	9.056.000	264 Dokumen	9.056.000	100%	***100%***
4.1.10	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Aset Desa	264 Dokumen	29.362.200	142 Dokumen	28.551.000	53,79%	***97,24%***
4.1.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Kapasitas	100 Orang	6.078.800	100 orang	5.990.400	100 %	***98,55%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
4.1.12	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan HasilPembinaan Laporan Kepala Desa	2 Laporan	7.618.000	2 Laporan	7.568.000	100%	***99,34%***
4.1.13	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembanganDesa serta lomba Desa	21 Dokumen	22.360.000	21 Dokumen	22.360.000	100%	***100%***
5	***PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT***	***Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembagaannya diberdayakan***	**45%**	**770.140.450**	**45%**	**757.530.161**	**100 %**	***98,36%***
5.1.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan**	**118 Desa**	**770.140.450**	**77 Desa**	**757.530.161**	**65,25%**	***98,36%***
5.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, Lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa danmasyarakat Hukum adat	300 Dokumen	76.049.450	300 Dokumen	75.602.500	100%	***99,41%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
5.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	384 Lembaga	64.214.150	384 Lembaga	63.710.000	100%	***99,21%***
5.1.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekomoni Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatana Asli Desa	2 Dokumen	24.842.800	2 Dokumen	24.449.000	100%	***98,41%***
5.1.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemenfataan teknologi Tepat Guna	2 Laporan	62.784.000	2 Laporan	61.969.000	100%	***98,70%***
5.1.5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan hasil fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	29.102.700	1 Laporan	28.429.000	100%	***97,69%***

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	KINERJA TAHUN 2025					
			TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6	
5.1.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteran Keluarga PKK	110 Dokumen	513.147.350	110 Dokumen	503.370.661	100%	***98,09%***
				12.769.226.457		**11.708.532.863**		**91,69 %**

1. **Analisis capaian kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025**

❖ ***Dalam Pelaksanaan Program, Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Keluaran sebagai berikut :***

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi berupa jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
3. Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
4. Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD.
5. Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.
6. Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan.
7. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.
8. Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan.
9. Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD.
10. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
11. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan.
12. Jumlah Laporan penyediaan jasa Surat Menyurat.
13. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.
14. Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.
15. Jumlah Mebel yang di pelihara.
16. Jumlah Peralatan Mesin yang di pelihara.

17. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Gedung yang dipelihara/di rehabilitasi.

- ***Dalam pelaksanaan Program Penataan Desa telah direalisasi keluaran yaitu data desa yang mendapatkan fasilitasi penataan desa***

  - Realisasi keluaran Program Penataan desa didukung keluaran dari kegiatan penyelenggaraan penataan desa berupa : jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi di bidang penataan desa yang didukung oleh sub kegiatan :
    1. Fasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa dengan keluaran : Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa.
    2. Fasilitasi Tata Wilayah Desa dengan keluaran : Jumlah desa yang melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai Permendagri 45 tahun 2016.
    3. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa dengan keluaran Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan kewenangan desa.
    4. Fasilitasi Sarana Prasarana Desa dengan keluaran : Jumlah Unit Sarana Prasarana Desa hasil fasilitasi.

- ***Dalam pelaksanaan Program Kerja sama Desa telah direalisasi keluaran yaitu data desa yang mendapatkan fasilitasi kerjasama desa***

  - Realisasi keluaran Program Kerjasama Desa didukung keluaran dari kegiatan penyelenggaraan kerjasama desa berupa : data desa yang mendapatkan fasilitasi di Kerjasama desa yang didukung oleh sub kegiatan :
    1. Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam kabupaten/kota dengan keluaran : jumlah dokumen hasil fasilitasi fasilitasi

Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota.

2. Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dengan keluaran : jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga.
3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan keluaran : Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pembangunan Kawasan perdesaan.

❖ ***Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa***

Analisis Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025

- Analisis Capaian Kinerja dalam pelaksanaan program administrasi pemerintahan desa Indikator keluaran adalah jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi tata kelola Administrasi Pemerintahan Desa.
- Realisasi keluaran program administrasi pemerintahan desa didukung keluaran dari kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa berupa desa yang mendapatkan fasilitasi tata kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa.
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas.

5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
6. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan keluaran Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
7. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan keluaran : Jumlah Dokumen Profil Desa Yang Tersusun.
8. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dengan keluaran : Jumlah Anggota BPD Yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas.
9. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa dengan keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa.
10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

❖ ***Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Keuangan Aset dan Ekonomi Desa***

- Analisis capaian kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Bidang Keuangan, Aset, dan Ekonomi Desa

  Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 berfokus pada Siklus Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta pelaksanaan Fasilitasi Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

- Realisasi Program Administrasi Pemerintahan Desa

  Dalam waktu bersamaan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat mandatori yaitu Pembangunan Gedung Pergudangan dan Kelengkapan KDMP di desa desa di Kabupaten Nganjuk. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan kepada desa di kabupaten Nganjuk. Hal ini diimplementasikan pada 3 Subkegiatan, antara lain:

  1. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

     Tugas dan fungsi pembinaan pada subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa diimplementasikan dengan melaksanakan bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Desa kepada 264 Sekretaris Desa di Kabupaten Nganjuk.

     Realisasi Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa adalah:

     Penyaluran Dana Desa Tahap I: tersalur ke 263 Desa

     Penyaluran Dana Desa Tahap II: tersalur ke 233 Desa

     Penyaluran Alokasi Dana Desa I : tersalur ke 264 Desa

     Penyaluran Alokasi Dana Desa II : tersalur ke 264 Desa

     Penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dapat tercapai maksimal karena ada beberapa hal, yakni:

     a. Desa Sawahan Kecamatan Sawahan yang mendapatkan punishment dari Keementerian Keuangan Republik Indonesia dikarenakan tidak melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa pada Tahun Anggaran sebelumnya sesuai regulasi yang ada.

b. Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot yang Kepala Desanya terkena permasalahan hukum (praktik korupsi), sehingga Dana Desa Tahap II tidak disalurkan.

c. Serta ada 29 desa yang tidak dapat salur Dana Desa Tahap II dikareanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 81 Tahun 2025 dianggap terlambat dalam melaksanakan pengajuan penyaluran Dana Desa Tahap II (Non Earmark).

2. Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa

   Wujud kerja sebagai upaya mencapai target kinerja Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa yang telah ditetapkan, Bidang Keuangan, Aset, dan Ekonomi Desa telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

   Fasilitasi penganggaran Modal Penyertaan BUM Desa dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025, di samping itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk juga memfasilitasi dalam penyusunan Analisa Usaha BUM Desa dalam rangka pelaksanaan program Ketahanan Pangan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk juga melaksanakan fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Program Pemberdayaan BUM Desa ke 2 Desa di Kabupaten Ngganjuk, yaitu Desa Banaran Kecamatan Pace, dan Desa Kuncir Kecamatan Ngetos.

3. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

   Pada fasilitasi pengelolaan aset desa, difokuskan pada penyusunan draf Peraturan Bupati Nganjuk tentang Pengelolaan Aset Desa. Disamping kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah evaluasi implementasi SIPADES 3.0 yang sampai dengan 31 Desember 2025 sudah diimplementasikan oleh 264 desa di Kabupaten Nganjuk.

❖ ***Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat***.

Analisis capaian kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025 Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat data keluaran/output sebagai berikut:

a. Fasilitasi penataan LKD dengan output pemenuhan legalitas LKD antara lain : posyandu (yang terdiri dari SK Tim pembina Posyandu Kabupaten, SK Tim pembina Posyandu Kecamatan, SK Tim pembina Posyandu Tk Desa, SK Posyandu (Kader dan pengurus), SK pemberian insentif Kader dan pengurus) dan SK KPM.
b. Fasilitasi TP PKK Kabupaten nganjuk dengan output fasilitasi pertemuan anggota PKK, fasilitasi pertemuan pleno, fasilitasi pertemuan pengurus inti PKK, fasilitasi HKG PKK, fasilitsi pertemuan PKK se bakorwil bojonegoro, dan fasilitasi pelaksanaan capacity building TPPKK dan pertemuan luar daerah dan dalam daerah.
c. Fasilitasi pelatihan usaha ekonomi masyarakat berupa pelatihan membuat kue kering dan keripik tempe di kecamatan Baron.
d. Fasilitasi penilaian gotong royong terbaik tingkat kecamatan dan kabupaten.
e. Fasilitasi pelatihan TTG dalam rangka TMMD dan pelatihan TTG pembuatan pupuk cair dari limbah rumah tangga.

II. Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

❖ **Analisis realisasi output Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :**

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi berupa jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan keluaran DPA dan Anggaran Kas

sudah dilaksanakan pada Tribulan I. Sedangkan DPPA dan Perubahan Anggaran Kas sudah dilaksanakan pada tribulan IV.

2. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan keluaran 31 orang/bulan.
3. Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : sudah dilaksanakan pada Tribulan I.
4. Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dengan keluaran : Laporan LRA, Fungsional, DTH, laporan e-bupot / e-cortex dan verifikasi BMD per bulan. Laporan semesteran keuangan sudah dilaporkan.
5. Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
6. Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
7. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
8. Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
9. Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
10. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
11. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
12. Jumlah Laporan penyediaan jasa Surat Menyurat dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
13. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan keluaran : sudah dilaksanakan.

14. Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
15. Jumlah Mebel yang di pelihara dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
16. Jumlah Peralatan Mesin yang di pelihara dengan keluaran : sudah dilaksanakan.
17. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Gedung yang di pelihara/di rehabilitasi dengan keluaran : sudah dilaksanakan.

2. **Dalam pelaksanaan Program Penataan Desa telah direalisasi keluaran yaitu data Desa yang *mendapatkan fasilitasi penataan desa***

- Realisasi keluaran Program Program Penataan desa didukung keluaran dari kegiatan penyelenggaraan penataan desa berupa : data desa yang mendapatkan fasilitasi di bidang penataan desa yang didukung oleh sub kegiatan :

  1. Fasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa dengan keluaran : Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa.

     Sampai dengan Tribulan IV ini realisasinya 0.

     Analisis: Tidak adanya realisasi menunjukkan stabilitas struktur organisasi desa. Tidak ada urgensi untuk melakukan likuidasi desa akibat bencana besar atau penggabungan karena kegagalan penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi geografis dan demografis desa-desa di wilayah tersebut masih memenuhi syarat minimum menjadi desa definitif sesuai Pasal 5-11 Permendagri 1/2017.

  2. Fasilitasi Tata Wilayah Desa dengan keluaran : data desa yang melaksanakan penetapan tata wilayah desa (Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai Permendagri 45 tahun 2016).

Pada Tribulan IV ada 19 desa yang mendapatkan fasilitasi tata wilayah desa. Dengan rincian 10 desa sudah sampai pada proses harmonisasi dengan Kementrian Hukum dan Ham sedangkan 9 desa sudah sampai pada verifikasi teknis dari Badan Informasi Geospasial.Hal ini dikarenakan untuk pelaksanaan verifikasi teknis dan yuridis menunggu jadwal dan informasi dari Dinas PMD Prov Jawa Timur.

3. Fasilitasi Kewenangan Desa dengan keluaran jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi kewenangan desa. Pada tribulan IV tidak ada realisasi, karena kegiatan fasilitasi kewenangan desa sudah dilakukan pada tribulan sebelumnya.
4. Fasilitasi Sarana Prasarana Desa dengan keluaran : Jumlah Unit Sarana Prasarana Desa hasil fasilitasi.Pada tribulan IV jumlah sarana prasarana hasil fasilitasi adalah 22 unit. Secara keseluruhan, fasilitasi sarpras telah berjalan secara akuntabel mulai dari perencanaan yang berbasis data kebutuhan riil sampai dengan realisasi fisik dan pelaporan. Meskipun realisasi hanya mencakup 22 desa, hal ini merupakan **pilihan strategis** karena desa yang mendapatkan fasilitasi adalah desa yang mendapatkan program BKK provinsi Jatim tahun 2025. Dan program BKK provinsi Jatim menjadi salah satu penilaian MCP KPK.

3. **Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kerja Sama Desa telah direalisasi keluaran yaitu dokumen hasil fasilitasi kerja sama desa**.

- Realisasi keluaran Program Peningkatan Kerja Sama desa didukung keluaran dari kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa berupa : Dokumen hasil fasilitasi Kerjasama desa yang didukung oleh sub kegiatan :
    1. Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota dengan keluaran : dokumen hasil fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota.

Pada Tribulan IV ini dokumen yang dihasilkan adalah 0 karena dokumen laporan pertanggungjawaban tahun 2025 dan dokumen perencanaan tahun 2026 dibuat dan ditandatangani setelah tutup tahun anggaran

2. Fasilitasi Kerjasama antar Desa Pihak Ketiga dengan keluaran : dokumen hasil fasilitasi Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga sebanyak 6 dokumen perjanjian kerjasama desa dengan pihak ketiga.
3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan keluaran :1 dokumen Hasil fasilitasi pembangunan Kawasan perdesaan.

4. Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa telah direalisasi keluaran yaitu
Bidang Bina Pemerintahan Desa.

- Realisasi Keluaran Progran Administrasi Pemerintahan Desa didukung keluaran dari kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa berupa Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa sebanyak 1 dokumen yaitu Rekapitulasi Laporan hasil Pembinaan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, pada 264 Desa.
2. Fasilitasi Produk Hukum Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa sebanyak 528 dokumen telah dilaksanakan mulai pada tribulan II, III dan IV telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintahan Desa dan juga fasilitasi Evaluasi penyusunan perubahan APBDes Tahun 2025 sebanyak 264

Dokumen dan fasilitasi evaluasi penyusunan Perdes APBDes Tahun 2026 sebanyak 264 Dokumen.

3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yaitu sebanyak 264 Dokumen. Telah dilaksanakan sosialisasi petunjuk teknis penyusunan RKP Desa Tahun 2026, Rapat Koordinasi dengan Kecamatan Dan Pemerintahan Desa serta Fasilitasi Evaluasi Perubahan RPJMDes, sebanyak 264 Desa dan Fasilitasi Evaluasi Penyusunan RKP sebanyak 264 Desa. Realisasi Keluaran dari Sub Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa melebihi target keluaran yaitu dari 264 dokumen menjadi 528 dokumen yaitu dokumen Perubahan RPJMDes dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa.
4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sebanyak 100 orang. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa melalui SIBERMATA DESA dan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa.
5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa yaitu 1 Laporan. Dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024, Sub Kegiatan ini dipergunakan untuk penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan Raperda tentang Desa yang sampai dengan tribulan IV telah selesai proses pembahasan dengan Pansus III DPRD, dan dipergunakan pula untuk kegiatan pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Plt dan Pj Kepala Desa.

6. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

realisasi keluaran adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu 1 Laporan. Pada Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi pemberhentian perangkat desa karena usia sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dilaksanakan fasilitasi pengajuan rekomendasi Bupati tentang pemberhentian perangkat desa usia 60 tahun.

7. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun yaitu sebanyak 264 dokumen. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi updating prodeskel menghasilkan Desa Swakarya dan swasembada.
8. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD realisasi keluaran adalah Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas 100 orang. Telah dilaksanakan fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD Antar Waktu, dan Rapat Koordinasi dengan Anggota BPD Antar Waktu dan Peningkatan Kapasitas melalui Sibermata Desa.
9. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa realisasi keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa yaitu 2 Laporan. Telah dilakukan pembinaan, Evaluasi dan Monitoring pada Pemerintah Desa dan Kepala Desa yang telah menyusun Laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2024 sebanyak 264 Desa.
10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan realisasi keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yaitu 21 Dokumen. Telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Kecamatan serta evaluasi dan monitoring perkembangan updating Epdeskel menghasilkan Desa Berkembang dan Desa Cepat Berkembang.

5. **Dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa telah direalisasi keluaran yaitu**
   Bidang Keuangan Aset dan Ekonomi Desa

   Adapun target keluaran yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa:

   1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan keluaran : 264 Desa.
   2. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa dengan keluaran : 80 Direktur BUM Desa.
   3. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dengan keluaran : 142 Dokumen.

6. **Realisasi keluaran Program Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dimaksud didukung keluaran dari kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa : data desa yang Kelembagaannya diberdayakan melalui peningkatan kapasitas. Didukung oleh sub kegiatan :**

   1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan MasyarakatHukum Adat dengan keluaran : 300 Dokumen.
   2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan keluaran : 384 lembaga

3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan keluaran : 2 Dokumen
4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan keluaran : 2 Laporan
5. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan keluaran : 1 laporan.
6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan keluaran : 110 dokumen.

III Analisis realisasi keuangan Perangkat Daerah Tahun 2025

❖ **Realisasi Keuangan pada Program Dinas PMD Tahun 2025**

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD anggaran Rp. 39.307.200,- dengan realisasi Rp. 39.114.250,- atau 99,51%.
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran Rp. 5.255.535.000,- dengan realisasi Rp. 4.469.531.683,- atau 85,04%.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD anggaran Rp. 5.691.000,- dengan realiasi Rp. 5.593.000,- atau 98,28%.
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD anggaran Rp. 20.414.000,- dengan realiasi Rp. 20.413.000,- atau 99,99%.
5. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor anggaran Rp. 19.998.900,- dengan realisasi Rp. 19.982.300,- atau 99,92%.
6. Penyediaan Bahan logistik kantor anggaran Rp. 55.275.400,- dengan realisasi Rp. 54.686.932,- atau 98,94%.
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan anggaran Rp. 2.152.500,- dengan realisasi Rp. 1.972.000,- atau 91,61%.

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan anggaran Rp. 3.000.000,- dengan realisasi Rp. 3.000.000.- atau 100%.
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD anggaran Rp. 236.928.000,- dengan realisasi Rp. 236.835.799,- atau 99,96%.
10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD anggaran Rp. 15.666.000,- dengan realisasi Rp. 14.815.459,- atau 94,57%.
11. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya anggaran Rp. 82.415.058,- dengan realisasi Rp. 80.662.950,- atau 97,87%.
12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran Rp. 27.026.000,- dengan realisasi Rp. 26.853.453,- atau 99,36%.
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik anggaran Rp. 62.000.000,- dengan realisasi Rp. 59.400.076,- atau 95,81%.
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan anggaran Rp. 328.279.693,- dengan realisasi Rp. 326.320.757,- atau 99,40%.
15. Pemeliharaan Mebel anggaran Rp. 3.302.754,- dengan realisasi Rp. 3.270.750,- atau 99,03%.
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran Rp. 38.850.000,- dengan realisasi Rp. 38.850.000,- atau 100%.
17. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya anggaran Rp. 254.111.627,- dengan realisasi Rp. 252.948.559,- atau 99,54%.

❖ Realisasi keuangan Program Penataan Desa pada Tribulan IV Tahun 2025 sebesar **: Rp. 57.167.600,-**

1. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa sebesar Rp. 0,-

2. Kegiatan fasilitasi kewenangan desa Rp. 1.800.000,-
3. Kegiatan fasilitasi sarpras desa Rp. 37.409.800,-
4. Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa Rp. 17.957.800,-

❖ Realisasi keuangan Program Peningkatan Kerja Sama Desa dan Tahun 2025

a. Kegiatan fasilitasi Kerjasama Desa antar desa dalam kabupaten/ kota pada tribulan IV sudah dilaksanakan dan sudah terealisasi sebesar Rp. 30.714.322,-
b. Kegiatan fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga baru dilaksanakan pada tribulan IV sesuai anggaran kas dan rencana aksi kegiatan Penataan Desa Rp. 1.000.000,-
c. Kegiatan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan pada tribulan IV sudah terealisasi sebesar Rp. 15.811.385,-

a. Analisis Realisasi Keuangan Perangkat daerah tahun 2025

Realisasi Keuangan Program Administrasi Pemerintahan Desa pada Bidang Bina Pemerintahan Desa tahun 2025.

Realisasi Keuangan pada Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelengagaran Administrasi Pemerintah desa sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 335.474.250,- didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 8.201.900,-. Sampai dengan tribulan IV/ Akhir Tahun realisasi keuangan sebesar Rp. 8.201.900,- atau 100%.
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 80.418.500,- Sampai dengan tribulan IV/ Akhir Tahun realisasi anggaran sebesar Rp. 77.193.500,- atau 95.99%.
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Anggaran sebesar Rp. 25.273.500,- realisasi keuangan sampai dengan Tribulan IV/akhir tahun sebesar Rp. 23.773.500,- atau 94,06%.

4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 8.400.500,- Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Tribulan IV/akhir tahun sebesar Rp. 8.287.100,- atau 98,64%.
5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp. 167.358.500,- realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Tribulan IV/akhir tahun sebesar Rp. 166.152.850,- atau 99.28%.
6. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan anggaran Rp. 7.279.400,- realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Tribulan IV sebesar Rp. 6.891.000,- atau 94,66%.
7. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan anggaran sebesar Rp. 9.056.000,- realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Tribulan IV/akhir tahun sebesar Rp. 9.056.000,- atau 100%.
8. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dengan anggaran sebesar Rp. 6.078.800,- realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Tribulan IV/akhir tahun sebesar Rp. 5.990.400,- atau 98.55%.
9. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp. 7.618.000,- realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan tribulan IV/akhir tahun sebesar Rp. 7.568.000,- atau 99,34%
10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 22.360.000,- realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan tribulan IV/akhir tahun sebesar Rp. 22.360.000,- atau 100%

❖ **Realisasi Keuangan Program Keuangan Aset dan Ekonomi Desa**

Realisasi Keuangan Program Administrasi Pemerintahan Desa pada Bidang Keuangan Aset dan Ekonomi Desa tahun 2025 sebesar Rp. 4.747.596.987,- didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa anggaran Rp. 4.911.941.775,- dengan realisasi Rp. 4.670.029.187,- atau 95,08%.
2. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa anggaran Rp. 49.704.750,- dengan realisasi Rp. 49.016.800,- atau 98,62%.
3. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa anggaran Rp. 29.362.200,- dengan realisasi Rp. 28.551.000,- atau 97,24%.

❖ **Realisasi keuangan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**, **Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Tahun 2025**

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Anggaran sebesar Rp. **76.049.450,-** realisasi keuangan sebesar Rp. **75.602.500,-** atau **99,41**%
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Anggaran sebesar Rp. **64.214.150,-** realisasi keuangan sebesar realisasi keuangan sebesar Rp. **63.710.000**,- atau **99,21**%
3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Anggaran sebesar Rp. **24.842.800,-** realisasi keuangan sebesar Rp. **24.449.000**,- atau **98,41**%.

4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Anggaran sebesar Rp. **62.784.000**,- realisasi keuangan sebesar Rp. **61.969.000,-** atau **98,70**%.
5. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Anggaran sebesar Rp. **29.102.700**,- realisasi keuangan sebesar Rp. **28.429.000**,- atau **97,69%**
6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Anggaran Sebesar Rp. **513.147.350,-** realisasi keuangan sebesar Rp. **503.370.661,-** atau **98,09%**

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
1	Tujuan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dengan kegiatan Pemutakhiran Data Desa bersumber dari Data Profil Desa	Masih Banyaknya jumlah Desa dengan status indeks Desa Membangun dalam katagori berkembang dan Maju
2	Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Desa	Adanya Program peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD dan Desa baik dari Kementerian dan Dinas PMD Provinsi Jatim.	Tenaga Pendamping Desa belum memiliki kemampuan yang merata dalam pendampingan dan belum sesuai harapan.
3		Regulasi tentang Desa semakin lengkap.	Masih adanya regulasi yang tumpang tindih.
4		Adanya kegiatan evaluasi dan perlombaan yang memacu semangat dan motivasi.	Kemampuan SDM dalam memahami regulasi yang berlaku secara menyeluruh.
5		Kebijakan ekonomi yang berpihak pada urusan pemberdayaan masyarakat.	Kondisi keberdayaan dan ketahanan ekonomi masyarakat yang masih rendah/ lemah.
6		Tersedianya dukungan anggaran APBD untukurusan pemberdayaan masyarakat.	Kondisi keberdayaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat masih rendah.
7		Tersedianya sumber daya alam (SDA) yang potensial untuk dikembangkan.	Terbatasnya kualitas sikap, nilai dan budaya gotong royong pada masyarakat untuk menuju kemandirian.

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
8		Potensi eksistensi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.	Terbatasnya motivasi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam (SDA).
9		Keterbukaan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat	Terbatasnya kemampuan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan dalam tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	**2**	**3**	**4**
1	**PROGRAM PENATAAN DESA**		
2	**Penyelenggaraan Penataan Desa**		
3	Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status	Telah dilakukannya kegiatan rutin update status desa secara berkala setiap tahun sehingga mudah untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan	Pada tahun 2025 ini Adanya peralihan dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) yang sebelumnya 3 indikator menjadi 6 indikator maka perlu sosialisasi dan pendampingan yang intensif kepada desa pada saat melakukan pemutakhiran data indeks desa sehingga tidak terjadi penurunan status desa. Karena jumlah kuesioner yang banyak

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
			(1879 pertanyaan) memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengisian
4			Pemahaman yang keliru dari pemerintah desa yang tidak mau meningkat status desanya karena takut anggaran Dana Desa Berkurang
5			Pada pelaksanaan update status desa, pemerintah desa terlalu bergantung pada pendamping desa
6	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Perpres no 23 tahun 2021 dan Permendagri 45 tahun 2016	Dukungan anggaran APBD yang kurang untuk pelaksanaan fasilitasi tata wilayah desa
7		Koordinasi antara Dinas PMD Provinsi, Badan Informasi dan Geospasial dengan Dinas PMD Kabupaten selalu intens untuk percepatan kegiatan tata wilayah desa	Hasil pelaksanaan PPBDes harus mendapatkan berita acara verifikasi teknis dari BIG sebagai dasar penyusunan Perbup dan verifikasi yuridis dari Kemenkumham dan Kemendagri yang jadwalnya ditentukan oleh provinsi/ pusat sehingga memperlambat penyusunan perbup
8			Pemerintah Daerah tidak mempunyai tenaga teknis sehingga pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga/ swakelola tipe 2
9	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Dukungan anggaran dari APBD untuk kegiatan fasilitasi penataan kewenangan desa	Belum semua pemerintah desa memahami tentang perdes kewenangan desa dan

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
			implementasinya
10		Perbup 35 tahun 2016 tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dantelah ditindaklanjuti oleh 264 desa yang sudah menyusun perdes kewenangan desa	
11	Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa	Dukungan anggaran dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten untuk kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa	Keterbatasan waktu pelaksanaan karenasarpras desa yang bersumber dari BKK baru bisa dilaksanakan setelah PAK
12	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		
13	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**		
14	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	PP no 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa	Belum semua kegiatan kerjasama antar desa membentuk BKAD
15		Permendagri no 96 tahun 2017 tentang Tata Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa,	Kurangnya motivasi dari pengelola Bumdesma untuk membentuk unit usaha baru selain DBM
16		Permendesa no 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama	Perlu adanya peningkatan kapasitas untuk direktur unit unit lain

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
17		Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat	Efisiensi biaya operasinal Bumdesma perlu diperhatikan
18		Peraturan Bupati no 4 tahun 2022 tentang Perlindungan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Mlik Desa Bersama	
19		Dukungan anggaran dari APBD untuk kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa	
20		Telah bertransformasinya kegiatan pengelolaan DBM Eks PNPM menjadi Bumdesma Lkd	
21	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Permendagri 96 tahun 2017 tentang Tata Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa	Perjanjian Kerja Sama yang dibuat masih sederhana dan belum menunjukkan menguntungkan bagi pemerintah desa
22		Dukungan anggaran dari APBD untuk kegiatan fasilitasi kerjasama antara desa dengan pihak ketiga	Belum semua desa yang sudah melakukan kerjasama desa dengan pihak ketiga melaporkan kepada Dinas PMD sehingga belum bisa memfasilitasi semua desa dan belum teridentifikasi semua permasalahan

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
23			Perlu adanya pembaharuan dokumen perjanjian kerjasama yang sudah habis masa berlakunya
24	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Permendes PDTT nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan	Setelah pembentukan BKAD dan Bumdesma Kawasan tidak ada pendampingan sehingga tidak ada program kerja
25		Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk 2010-2030	
26		Perbup nomor 11 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Telah ditetapkannya Kawasan Perdesaan dengan SK Bupati Nganjuk Nomor 188/70/K/411.013/2016	Masing-masing desa masih memikirkan ego sektoral masing masing dan belum berfikir secara holistik dan kompherensif untuk bersama2 membangun kawasan perdesaan
27		Adanya dukungan anggaran dari APBD untuk fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Belum dibuat perencanaan pengembangan kawasan yang matang dan belum ada penyertaan modal dari desa untuk pengembangan kawasan perdesaan
28		Telah dibentuk BKAD Kawasan dan Bumdesma Kawasan	Belum aktifnya Bumdesma Kawasan terutama untuk kecamatan Ngetos
29	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
30	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		
31	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.	Aparat Pemerintahan Desa yang kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugas administrasi. Kurangnya memahami prosedur administrasi yang benar,pengelolaan data, atau penggunaan teknologi informasi yang efektif.
32		Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa	
33	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Keterbatasan SDM Perangkat Desa
34		Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa	Tidak tepat waktu dalam tahapan penyusunan produk hukum desa
35		SK Petunjuk Teknis Penyusunan APBDes	
36		Tim Evaluasi dan klarifikasi penyusunan produk hukum desa	
37	Fasilitasi Penyusunan PerencanaanPembangunan Desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Keterbatasan kemampuan SDM Perangkat Desa

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
38		Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Keterbatasan tenaga ahli dalam bidang perencanaan
39		Tim Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
40	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Anggaran APBD untuk Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa, Aplikasi SISKEUDES, Peraturan Bupati No 57 jo. Peraturan Bupati Nganjuk No. 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Kurangnya SDM untuk membina dan melaksanakan pendampingan, monitoring, evaluasi pelaksanaan APB Desa. Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan di Desa yang kurang optimal.
41	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Keterbatasan Kemampuan SDM Perangkat Desa
42		Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Keterbatasan penguasaan teknologi informasi
43		Media Pembelajaran Mandiri Aparatur Pemerintah Desa (Sibermata Desa)	
44		Perangkat Desa Mengikuti Program P3PD dari Kemendagri	
45	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Anggaran APBD untuk Kegiatan Pembinaan BUM Desa, Anggaran Penyertaan Modal dari APB Desa	Tidak adanya regulasi yang mewajibkan BUM Desa memberikan / mengirimkan data laporan pertanggungjawaban BUM Desa
46	Penyelenggaraan Pemilihan,	Tersedianya dukungan anggaran APBD	Adanya Kepala Desa yang bermasalah dengan

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	untuk Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	hukum
47		Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Pelayanan terhadap masyarakat menjadi terhambat
48		Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun	UU Nomor 3 Tahun 2024 belum ditindaklanjutan PP yang mengaturnya
49	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Proses pemberhentian dan pengangkatan terhambat karena UU 3/2024 belum adanya PPnya.
50		Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Belum ada peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024
51	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Proses penyusunan profil desa membutuhkan waktu dan upaya yang cukup. Namun, desa seringkali memiliki jadwal yang padat dengan sumber daya manusia yang terbatas. Keterbatasan waktu dan personel yang tersedia dapat menghambat pelaksanaan yang efektif dari penyusunan profil desa.
52		Evaluasi Kinerja Desa	Keterbatasan data yang dimiliki oleh desa

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
53		Permendagri 12 Tahun 2007	Tidak melakukan upditing profil desa
54	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Anggaran APBD untuk Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset Desa, Aplikasi SIPADES 3.0	Kapasitas SDM Pengelola Aset Desa yang belum kuat.
55	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	SDM Anggota BPD kurang memadahi
56		Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Kurangnya koordinasi antara Pemerintahan Desa dan Anggota BPD
57		Perpanjangan masa jabatan anggota BPD dari 6 tahun menjadi 8 tahun	
58		Media pembelajaran mandiri anggota BPD (Sibermata Desa)	
59		Anggota BPD Mengikuti Program P3PD dari Kemendagri	
60	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kurang tertibnya administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa
61			Keterbatasan SDM Pemerintahan Desa
		Permendagri Nomor 46/ 2016	Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan Anggota BPD

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Keterbatasan Data yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa
		Permendagri 81 tahun 2015	Pemerintahan desa kurang tertib dalam mengupdate Epdeskel
65	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		
66	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
67	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	anggaran pembinaan dari APBD, Perbub 1/2020 tentang LKD sebagai dasar hukum legalitas LKD, Permendagri no 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, SK Bupati Nganjuk	Perlunya sosialisasi posyandu 6 SPM yang ditindaklanjuti dengan pendampingan implementasi posyandu 6 SPM

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
	Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Nomor 100.3.3.2/251/K/411.013/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Pos Pelayanan Terpadu	
68	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	anggaran pembinaan dari APBD, Perbub 1/2020 tentang LKD sebagai dasar peningkatan kapasitas	Pemerintah Desa kurang melibatkan LKD sesuai dengan tugas fungsinya, Perlunya Peningkatan Kapasitas bagi LKD
69	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	anggaran pembinaan dari APBD, dukungan pembinaan lintas OPD sesuai tupoksinya	kurangnya usaha ekonomi masyarakat yang terintegrasi dengan BUMDesa
70	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	anggaran pembinaan dari APBD, anggaran dari APBDes	Pemerintah desa belum menjadikan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebagai prioritas pembangunan di desa
71	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	anggaran pembinaan dari APBD	Semakin lunturnya nilai gotong royong masyarakat, pemdes kurang aktif melaporkan kegiatan Gotong royong
72	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	Perpres 99/2017 dan Permendagri 36/2020 yang mengatur tentang PKK, anggaran	TP PKK Desa masih banyak yang tidak aktif, hanya menjadikan kegiatan PKK sebagai

No	Program/ Kegiatan	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
	Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	fasilitasi pembinaan dari APBD dan APBDesa, dukungan Pengurus TPPKK Kabupaten yang aktif	formalitas, banyak yang tidak membuat laporan tahunan PKK Sinergi TP PKK kabupaten dengan Perangkat daerah masih kurang

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Laporan Capaian Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 disusun sebagai bentukpertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2025 yang merupakan penjabaran Renstra DPMD tahun 2025 – 2029. Laporan dimaksud memuat informasi tentang Pencapaian Rencana Kerja Tahun 2025 dan progress capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 yang implementasinya tertuang dalam RKA-K/L, serta permasalahan dan upaya penyelesiannya.

Penyusunan Laporan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini diucapkan banyak terima kasih, semoga dapat bermanfaat dan digunakan sesuai tujuan penyusunannnya.

IV.2. Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KabupatenNganjuk tahun 2025 disusun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai, ketersediaan anggaran menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan renja sesuai dengan kebutuhan. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan renjamaka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan sub kegiatan dengan prioritas yang kecuali dalam mendukung IKU maupun IKI.

Untuk pelaksanaan renja diperlukan beberapa kaidah yaitu seluruh unsur perangkat Daerah dan stakeholder terkait harus melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dengan sebaik – baiknya. Setiap unsur perangkat Daerah senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan diperlukan juga koordinasi yang baik antar unsur Perangkat daerah (bersinergi dan kolaborasi untuk menyukseskan pelaksanaan renja tahun berikutnya).

Rencana Tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
2. Memperkuat koordinasi sehingga tercipta sinergi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder Dinas PMD
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kunjung lapang, pembuatan laporan rakor berkala, pendampingan teknis dan fasilitas lain terutama terhadap jajaran Pemerintahan Desa yang

merupakan wilayah binaan Dinas PMD.

4. Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur Kegiatan.

5. Memberikan reward dan punishmen sesuai dengan performasi masing – masing.

Nganjuk, 02 Januari 2026
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Nganjuk

Dr. SOPINGI, A.P, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001

FORMULIR E.81

(VALIDASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK

PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDx/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2028		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV											
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13			14=7+13			15=14/6		16	
1	Meningkatnya Kemandirian Desa																													Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	78,5	Nilai	23.081.208.000	71,7	Nilai	5.451.070.674	73	**Nilai**	**6.449.553.132**		**Nilai**	**606.615.974**		**2.060.301.388**		**1.254.910.212**		**1.732.223.024**	74,15	**Nilai**	**5.654.251.598**	71,7	**Nilai**	**13.105.322.272**	91,34	48,11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun	43	dokumen	126.000.000	10	dokumen	30.119.680	14	**dokumen**	**39.307.200**	7	**dokumen**	**27.827.250**	3	**dokumen**	**10.467.000**	0	**dokumen**	0	4	**Dokumen**	**820.000**	14	**dokumen**	**39.114.250**	24	**dokumen**	**69.233.930**	55,81	54,95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	42	Laporan	126.000.000	9	Laporan	30.119.680	14	Laporan	39.307.200	7	Laporan	27.827.250	3	Laporan	10.467.000	0	Laporan	0	4	Laporan	820.000	14	Laporan	39.114.250	23	Laporan	69.233.930	54,76	54,95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	288	dokumen	15.516.608.000	96	dokumen	4.074.169.125	103	**dokumen**	**5.211.640.000**	9	**dokumen**	**463.146.691**	24	**dokumen**	**1.793.245.812**			**974.109.965**			**1.263.035.413**	105	**dokumen**	**4.495.537.883**	71,7	**dokumen**	**8.549.706.808**	24,90	46,79	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.18.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	orang/bulan	16.262.608.000	106	orang/su	4.054.584.885	31	orang/bulan	5.255.595.000	31	orang/ 3 bulan	462.426.691	31	orang/3 bulan	1.787.075.612	31	orang/3 bulan	968.516.965	31	orang/3 bulan	1.251.512.413	31	orang/12 bulan	4.469.531.683	139	orang/bulan	8.524.116.568	408,82	46,68	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.18.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	24.000.000	2	Laporan	4.829.920	2	Laporan	5.691.000	2	Laporan	720.000	0	Laporan	0	0	Laporan	4.873.000	0	Laporan	0	2	Laporan	5.593.000	4	Laporan	10.222.920	66,67	42,60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.18.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ semestaran SKPD	204	Laporan	30.000.000	68	Laporan	14.954.320	72	Laporan	20.414.000	9	Laporan		21	Laporan	8.170.000	19	Laporan	720.000	23	Laporan	13.523.000	72	Laporan	20.413.000	140	Laporan	35.367.320	68,63	117,69	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	3612	dokumen	1.251.000.000	3602	dokumen	454.926.307	9,62	**dokumen**	**533.026.800**	707	**dokumen**	**21.706.324**	1054	**dokumen**	**54.108.386**	936	**dokumen**	**130.772.055**	867	**Dokumen**	**124.706.355**	3564	**dokumen**	**331.253.120**	71,7	**dokumen**	**826.219.427**	1,99	66,04	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.18.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang di sediakan	3	Paket	30.000.000	1	Paket	12.004.200	1	Paket	19.998.900	0	Paket	6.891.500	1	Paket	1.206.500	0	Paket	2.025.000	0	Paket	10.059.930	1	Paket	19.982.930	2	Paket	31.987.130	66,67	106,62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.18.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang di sediakan	24	Paket	330.000.000	8	Paket	74.667.894	8	Paket	55.275.400	2	Paket	9.851.220	0	Paket	18.040.531	4	Paket	10.391.955	2	Paket	16.603.226	8	Paket	54.686.932	16	Paket	129.354.830	66,67	39,20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.18.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan penggandaan yang di sediakan	8	Paket	21.000.000	2	Paket	3.049.170	2	Paket	2.137.500	0	Paket	-	2	Paket	3.972.000	0	Paket	-	0	Paket	0	2	Paket	1.972.000	4	Paket	5.021.170	66,67	23,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.18.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan perundang undangan yang disediakan	3	dokumen	12.000.000	1	dokumen	2.160.000	12	dokumen	5.000.000	3	dokumen	980.000	3	Dokumen	540.000	3	Dokumen	540.000	3	Dokumen	1.980.000	12	dokumen	3.000.000	15	dokumen	5.160.000	433,33	43,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.18.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan penyelenggaraan rapat koordinasi dan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1800	Laporan	780.000.000	584	Laporan	377.829.891	550	Laporan	136.928.000	1	Laporan	376.000	48	Laporan	24.311.500	229	Laporan	115.865.100	272	Laporan	99.483.189	550	Laporan	236.855.789	1134	Laporan	614.685.490	63,00	78,80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV						14=7+13			15=14/6		
2	3	4	5	6			7			8		9		10		11		12		13		14		K		Rp	K	Rp	16
	2.13.01.2.06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penata usahan arsip dinamis pada SKPD	9000	dokumen	78.000.000	3000	dokumen	25.215.348	3000	dokumen	15.866.000	701	dokumen	4.627.604	1.000	dokumen	8.037.855	700	dokumen	2.150.000	590	Dokumen	0	2991	dokumen	14.815.459	5991	dokumen	40.050.807	68,57	51,32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah pada yang di sediakan	223	unit	597.100.000	87	unit	238.291.000	**6**	**unit**	**82.415.058**	0	**unit**	-	4	**unit**	**30.003.300**	0	**Unit**	**29.875.650**	2	**Unit**	**20.784.000**	**6**	**unit**	**80.662.950**	73	**unit**	**318.953.950**	32,74	53,42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.07.O 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang diadakan	159	Unit	122.000.000	52	Unit	59.386.000	0	Unit	-		Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	52	Unit	59.386.000	32,70	45,40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.07.O 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan	47	Unit	475.100.000	15	Unit	182.905.000	6	Unit	82.415.058	0	Unit	-	4	Unit	30.003.300	0	Unit	29.875.650	2	Unit	20.784.000	6	Unit	80.662.950	21	Unit	263.567.950	44,68	55,48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150	Laporan	395.500.000	26	Laporan	83.195.484	**50**	**Laporan**	**89.026.000**	7	**Laporan**	**14.934.603**	7	**Laporan**	**20.915.455**	6	**Laporan**	**18.349.848**	6	**Laporan**	**32.053.623**	**26**	**Laporan**	**86.253.529**	52	**Laporan**	**169.449.013**	34,67	42,84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.08.O 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	6	Laporan	75.500.000	2	Laporan	23.296.348	2	Laporan	27.026.000	1	Laporan	4.577.603	1	Laporan	8.527.855	0	Laporan	8.168.404	0	Laporan	9.779.591	2	Laporan	26.853.453	4	Laporan	50.149.801	66,67	86,42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.08.O 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Air dan Listrik yang disediakan	144	Laporan	320.000.000	24	Laporan	59.899.136	24	Laporan	62.000.000	6	Laporan	10.557.000	6	Laporan	14.387.600	6	Laporan	12.181.444	6	Laporan	22.274.032	24	Laporan	59.400.076	48	Laporan	119.299.212	33,33	37,28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang di sediakan	382	Unit	2.995.000.000	85	Unit	930.369.078	**69**	**Unit**	**624.544.074**	7	**Unit**	**79.202.106**	39	**Unit**	**151.561.435**	12	**Unit**	**101.802.694**	11	**Unit**	**288.823.631**	**69**	**Unit**	**621.390.066**	154	**Unit**	**1.151.759.144**	40,31	48,09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.09.O 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara yang di bayarkan Pajaknya.	38	Unit	980.000.000	23	Unit	358.459.708	7	Unit	328.279.693	2	Unit	32.107.300	2	Unit	71.803.825	2	Unit	79.105.894	1	Unit	143.503.738	7	Unit	326.320.757	30	Unit	662.760.463	88,33	89,04	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.09.O 005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang di pelihara	97	Unit	35.000.000	20	Unit	3.243.000	20	Unit	3.302.754	0	Unit	-	20	Unit	3.270.750	0	Unit	-	0	Unit	0	20	Unit	3.270.750	40	Unit	6.513.750	41,24	18,61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.09.O 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang	67	Unit	150.000.000	40	Unit	38.228.703	40	Unit	38.850.000	5	Unit	-	15	Unit	18.845.000	10	Unit	9.260.000	10	Unit	12.745.000	40	Unit	38.850.000	80	Unit	77.078.703	119,40	51,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.09.O 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan gedung kantor lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	2	Unit	1.250.000.000	2	Unit	112.437.569	2	Unit	254.111.627	0	Unit	47.094.806	2	Unit	59.842.060	0	Unit	13.436.800	0	Unit	132.574.893	2	Unit	252.948.559	4	Unit	405.386.228	200,00	32,43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	Persentase Desa Dengan Penataan Sesuai Stardar Ketentuan	25	persen	900.000.000	27	persen	115.826.488	**25**	**persen**	**91.964.100**	0	**persen**	-	**13,4**	**persen**	**440.000**	0	**persen**	**33.400.400**	0	**persen**	**57.167.600**	**25,76**	**persen**	**91.008.000**	52,8	**persen**	**228.854.488**	211,04	25,18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.02.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa	189	Desa	900.000.000	69	Desa	115.826.488	**66**	**Desa**	**91.964.100**	0	**Desa**	-	**27**	**Desa**	**440.000**	0	**Desa**	**33.400.400**	**41**	**Desa**	**57.167.600**	**68**	**Desa**	**91.008.000**	131	**Desa**	**228.854.488**	69,31	25,18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.02.2.01.O 001	Pembentukkan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5	Desa	20.000.000	0	Desa	-	1	Desa	11.017.650	0	Dess	-	0	Desa	-			10.905.800	0		0	0	Desa	10.905.800	0	Desa	10.905.800	0,00	54,93	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.02.2.01.O 002	Fasilitasi Tata Penataan Wilayah	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	45	Desa	585.000.000	20	Desa	83.556.798	30	Desa	90.885.000	0	Dess	-	0	Desa	440.000			11.884.800	19	Desa	17.957.800	19	Desa	90.082.800	39	Desa	111.839.398	86,67	19,08	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.02.2.01.O 003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya	60	Desa	90.000.000	30	Desa	12.387.000	25	Desa	7.779.200	0	Dess	-	27	Desa	-			5.884.800	0		1.800.000	27	Desa	7.684.800	57	Desa	20.081.800	95,00	22,31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.02.2.01.O 006	Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa	Jumlah sarana dan Pra Sarana Desa	60	Unit	225.000.000	29	Unit	41.872.700	10	Unit	42.482.250	0	Unit	-	0	Unit	-			4.925.000	22	Unit	37.409.800	22	Unit	42.334.800	45	Unit	84.007.500	75,00	37,34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.03.	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	Persentase Desa Dengan Pelaksanaan Kerja sama Secara Aktif	87	persen	627.000.000	70	persen	150.267.796	87%	persen	**124.114.950**		persen	**12.055.200**	8	persen	**32.398.884**	16	persen	**30.592.076**	63	persen	**47.525.707**	87	persen	**122.671.867**	157	persen	**272.939.663**	180,46	45,53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I			II			III			IV										
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=7+13			15=14/6		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dan Pembangunan	230	Desa	627.000.000	230	Desa	150.267.796	230	Desa	124.114.950		Desa	12.055.200	4	Dokumen	32.398.884	41	desa	30.692.076	165	Desa	47.525.707	230	Desa	122.671.867	480	Desa	272.939.863	200,00	43,53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerjasama Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	60	dokumen	426.000.000	20	dokumen	101.457.514	10	dokumen	86.193.850	6	dokumen	7.940.588	2	Dokumen	26.358.044	2	dokumen	20.817.876	0	dokumen	30.714.322	10	dokumen	85.830.830	30	dokumen	187.288.344	50,00	43,96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kerja sama antar Desa dengan pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	60	dokumen	50.000.000	20	dokumen	6.113.300	15	dokumen	5.047.750	0	dokumen	-	2	Dokumen	-	7	dokumen	3.955.800	6	dokumen	1.000.000	15	dokumen	4.955.800	35	dokumen	11.069.100	58,33	22,14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	9	dokumen	151.000.000	3	dokumen	42.696.962	2	dokumen	32.873.350	0	dokumen	4.114.612	0	Dokumen	6.040.840	1	dokumen	5.918.400	1	dokumen	15.811.385	2	dokumen	31.885.237	5	dokumen	74.582.219	55,56	49,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Yang telah Menyelenggarakan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa sesuai Standar	100	persen	13.521.000.000	38	persen	5.365.595.355	100	**persen**	**5.333.053.825**		**persen**	607.667.840		**persen**	**1.120.513.442,00**		**persen**	**859.124.860,00**	100	**persen**	**2.495.765.093,00**	100	**persen**	5.083.071.237	138	**persen**	10.448.664.592	138,00	77,28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa	264	Desa	13.521.000.000	263	Desa	5.365.595.355	264	**Desa**	**5.333.053.825**		**Desa**	607.667.840		**Desa**	1.120.513.442,00		**Desa**	**859.124.860,00**	264	**Desa**	**2.495.765.093,00**	264	**Desa**	5.083.071.237	527	**Desa**	10.448.664.592	199,62	77,28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	15	dokumen	61.000.000	5	dokumen	9.997.000	4	dokumen	8.203.900	0	dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	4.276.900	4	Dokumen	3.925.000	4	dokumen	8.201.900	9	dokumen	18.198.900	60,00	29,83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa.	528	dokumen	240.000.000	528	dokumen	89.676.356	528	dokumen	80.418.500	0	dokumen	-	0	Dokumen	-	264	Dokumen	5.000.000	264	Dokumen	72.193.500	528	dokumen	77.193.500	1056	dokumen	166.869.856	200,00	69,53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.	264	dokumen	175.000.000	264	dokumen	38.901.000	264	dokumen	25.278.500	0	dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	2.500.000	528	Dokumen	21.273.500	528	dokumen	23.773.500	792	dokumen	60.674.500	300,00	34,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penggelolaan Keuangan Desa	264	dokumen	10.500.000.000	263	dokumen	4.790.569.434	264	dokumen	4.913.941.775	0	dokumen	574.010.940	0	Dokumen	1.304.719.342	196	Dokumen	758.850.480	88	Dokumen	2.234.449.045	284	dokumen	4.670.029.187	527	dokumen	9.460.598.821	199,62	90,10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapastas Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	280	Orang	190.000.000	80	Orang	144.708.000	100	Orang	8.400.500	0	Orang	-	0	Orang	975.000	100	Orang	975.000	0	Orang	6.337.100	100	Orang	8.287.100	180	Orang	152.995.100	64,29	80,52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0006	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa	20	dokumen	555.000.000	20	dokumen	58.874.055	80	dokumen	49.704.750	0	dokumen	33.657.500	0	dokumen	-	0	dokumen	200.000	80	Dokumen	15.199.300	80	dokumen	49.018.800	100	dokumen	107.890.855	500,00	19,44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1	Laporan	810.000.000	1	Laporan	101.671.000	1	Laporan	167.358.500	0	Laporan	-	0	Laporan	7.748.100	0	Laporan	47.882.500	1	Laporan	110.572.250	1	Laporan	166.152.850	2	Laporan	267.823.850	200,00	33,06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3	Laporan	150.000.000	1	Laporan	5.290.000	1	Laporan	7.279.400	0	Laporan	-	0	Laporan	1.700.000	0	Laporan	4.193.000	1	Laporan	1.000.000	1	Laporan	8.891.000	2	Laporan	12.181.000	66,67	8,12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	264	dokumen	120.000.000	264	dokumen	20.590.062	264	dokumen	9.058.000	0	dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	5.308.000	264	Dokumen	3.950.000	264	dokumen	9.058.000	528	dokumen	29.648.062	200,00	24,71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	20	dokumen	120.000.000	20	dokumen	39.266.448	264	dokumen	29.362.200	0	dokumen	-	0	Dokumen	1.503.000	0	Dokumen	19.318.000	142	Dokumen	7.730.000	142	dokumen	28.551.000	162	dokumen	67.817.448	810,00	56,51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Kapasitas	90	Orang	120.000.000	80	Orang	19.529.500	100	Orang	8.078.800	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	975.000	100	Orang	5.015.400	100	Orang	5.990.400	180	Orang	25.519.900	225,00	21,27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDa/4 tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II		III		IV						14=7+13		15=14/6		
1	2	3	4	5	K	6	Rp	K	7	Rp	K	8	Rp	K	9	Rp	K	10	Rp	K	11	Rp	K	12	Rp	K	13	Rp	K	Rp	K	Rp	16
		2.13.04.2.01.0.016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	6	Laporan	240.000.000	3	Laporan	19.772.500	2	Laporan	7.818.000	1	Laporan	-	1	Laporan	5.268.000	0	Laporan	1.700.000	0	Laporan	0	2	Laporan	7.568.000	5	Laporan	27.340.500	83,33	11,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.0.018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta lomba Desa	21	dokumen	240.000.000	21	dokumen	28.750.000	21	dokumen	22.360.000	0	dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	8.200.000	21	Dokumen	14.160.000	21	dokumen	22.360.000	42	dokumen	51.110.000	200,00	21,90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembaannya diberdayakan	57	persen	2.222.000.000	28	persen	752.017.036	**45**	**persen**	**770.140.450**		**persen**	**6.855.200**	**0**	**persen**	**201.335.704**	**0**	**persen**	**126.529.324**	**45**	**persen**	**422.809.933**	**45**	**persen**	**757.590.161**	**73**	**persen**	**1.509.547.197**	**128,07**	**67,94**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Polsikunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan	264	Desa	2.222.000.000	80	Desa	752.017.036	**118**	**Desa**	**770.140.450**		**Desa**	**6.855.200**		**Desa**	**201.335.704**	**41**	**Desa**	**126.529.324**	**77**	**Desa**	**422.809.933**	**118**	**Desa**	**757.590.161**	**196**	**Desa**	**1.509.547.197**	**75,00**	**67,94**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01.0.002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, Lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan masyarakat Hukum adat	720	dokumen	195.000.000	240	dokumen	14.482.000	900	dokumen	78.049.450	83	dokumen	-	52	Dokumen	15.647.500	101	Dokumen	35.450.000	54	Dokumen	24.505.000	300	dokumen	75.602.500	540	dokumen	90.084.500	75,00	48,20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV								14=7+13		15=14/6		
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13								16
					K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	
	2.13.05.2.01.0009	Pengelolaan Kesultan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Taruna), Lembaga LPM, dan Karang LPM, dan Karang Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kemitraanya	720	Lembaga	270.000.000	335	Lembaga	105.784.000	584	Lembaga	64.214.150	0	Lembaga	-	294	Lembaga	55.880.000	0	Lembaga	575.000	150	Lembaga	29.455.000	584	Lembaga	63.710.000	719	Lembaga	189.444.000	99,86	52,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatana Asli Desa	60	dokumen	107.000.000	21	dokumen	39.503.000	2	dokumen	24.642.800	0	dokumen	-	0	Dokumen	707.000	0	Dokumen	900.000	2	Dokumen	12.642.000	2	dokumen	24.449.000	25	dokumen	69.952.000	38,33	59,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan teknologi Tepat Guna	60	Laporan	45.000.000	20	Laporan	84.586.000	2	Laporan	62.784.000	0	Laporan	-	1	Laporan	46.384.000	0	Laporan	-	1	Laporan	15.585.000	2	Laporan	61.969.000	22	Laporan	146.555.000	36,67	325,68	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan hasil fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	60	Laporan	105.000.000	20	Laporan	94.490.000	1	Laporan	29.152.700	0	Laporan	-	0	Laporan	12.568.000	0	Laporan	8.000.000	1	Laporan	9.866.000	1	Laporan	28.429.000	21	Laporan	122.919.000	35,00	117,07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga PKK	805	dokumen	1.500.000.000	805	dokumen	413.727.086	110	dokumen	513.147.330	21	dokumen	6.955.200	22	Dokumen	92.354.204	42	Dokumen	59.804.324	25	Dokumen	320.556.983	110	dokumen	503.370.861	415	dokumen	918.587.857	138,07	61,13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
												12.789.226.457		1.288.995.214		9.414.909.438		2.308.656.872		4.755.491.398		6.958.041.304							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
																										Rata-rata capaian kinerja			138,14	54,06	
																										Predikat			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Nganjuk, 2 Januari 2026
KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK

Dr. SOFIDIN, A.P, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700802 199311 1 001